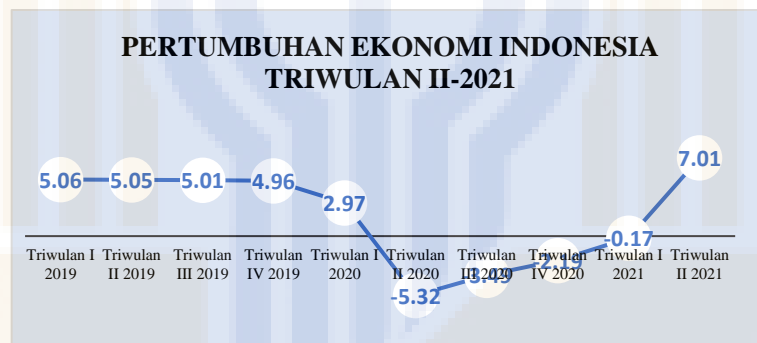


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini yaitu tahun 2022, Indonesia lebih berusaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2021 dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019-2021 yang di gambarkan menggunakan grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-Triwulan II-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 yaitu grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia per-triwulan II tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Karena pada saat itu Negara Indonesia dilanda *Virus Covid-19* yang mengakibatkan banyak kerugian khususnya dalam dunia bisnis disebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi akibat *lockdown* selama menghadapi masa pandemi tersebut. Kemudian meningkat kembali di tahun 2021 karena *Virus Covid-19* mulai berkurang dan keadaan di Indonesia mulai membaik dan kegiatan ekonomi pun mulai normal kembali.

Maka dari itu untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yaitu dengan cara menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis secara pesat. Proses ini pasti berpengaruh langsung untuk berbagai badan usaha di Indonesia. Badan usaha tersebut diantaranya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi.

Dari berbagai jenis badan usaha tersebut diusahakan untuk bisa lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan jenis usahanya. Termasuk koperasi juga harus bisa lebih maju dan dikenal sebagai salah satu badan usaha di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Dapat dilihat dari jumlah unit koperasi berdasarkan jenis, khususnya koperasi di provinsi Jawa Barat, Kota Bandung yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Unit Koperasi Berdasarkan Jenis di Kota Bandung

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	
	2019	2020
Jasa	38	38
Konsumen	2222	2153
Pemasaran	40	38
Produsen	18	20
Simpan Pinjam	212	207
Jumlah	2530	2456

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah koperasi berdasarkan jenis koperasi di Kota Bandung pada tahun 2019 dan 2020 jumlah koperasi terbanyak yaitu koperasi konsumen dan kemudian koperasi simpan pinjam. Karena sebagai contoh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, koperasi dengan jenis unit usaha simpan pinjam dan konsumen tersebut memang

banyak diminati oleh para anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota.

Koperasi juga merupakan badan usaha yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.” Definisi koperasi itu sendiri terletak pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan perekonomian rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Karena koperasi dalam wujud kegiatannya seluruh pengurus koperasi hingga anggotanya berusaha melakukan yang terbaik agar dapat bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap anggota memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Maka dari itu pada saat penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi harapannya dapat dipahami oleh para anggota.

Salah satu isi dari laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi yaitu laporan keuangan koperasi. Maka dari itu, perlunya laporan keuangan koperasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para anggotanya. Laporan keuangan yang berkualitas atau dikatakan ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan (Putri et al., 2021). Begitupun laporan keuangan koperasi juga memiliki standar sebagai pedoman nya. Pada saat ini koperasi menggunakan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) khususnya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Namun sebelum menggunakan SAK ETAP, koperasi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik (SAK EDAP). Tetapi karena hanya anggota koperasi yang berkontribusi dalam modal, maka SAK ETAP sudah cukup untuk digunakan.

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara nasional menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 tetapi penerapan sebelum tanggal efektif boleh dilakukan. Namun pada bulan Juni 2019, DSAK IAI menyetujui untuk merevisi SAK ETAP dengan mengadopsi dari *IFRS (International Financial Reporting Standards) for SMEs (Small and Medium-Sized Entities) 2015*. DSAK IAI sepakat untuk merevisi SAK ETAP menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 namun penerapan dini sudah dapat dilakukan pada tahun 2022. Pemberian judul SAK Entitas Privat ini memiliki tujuan untuk menghindari penggunaan kata tanpa akuntabilitas publik yang dapat menimbulkan kesalah pahaman, karena tujuan dari digantikannya SAK ETAP ke SAK EP konteksnya yaitu untuk laporan keuangan bertujuan umum dan untuk memberikan informasi keuangan kepada pengguna eksternal yang meliputi kreditor, lembaga pemerintah kredit (jika ada) dan sejenisnya.

SAK Entitas Privat dimasa yang akan datang akan menjadi salah satu pilar baru Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan akan lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP. Karena SAK EP sebagai pilar baru yang menggantikan

SAK ETAP memperkenalkan dan menjelaskan secara detail yang tidak diatur dalam SAK ETAP diantaranya, konsep biaya atau usaha yang berlebihan (*undue cost or effort*), aset kontinjensi dan liabilitas kontinjensi, total penghasilan komprehensif, memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif (yang terpisah dengan laporan laba rugi), mengatur secara lebih detail dan kompleks perlakuan akuntansi untuk instrument keuangan (aset dan liabilitas keuangan), mengatur lebih detail mengenai definisi pengukuran pada pengakuan awal, pengukuran selanjutnya dan pengungkapan properti investasi, mengatur entitas untuk memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk kelas aset tetapnya, dan karakteristik kualitas laporan keuangan yang sebagian point nya tidak diatur dalam SAK ETAP.

Karakteristik kualitas laporan keuangan harus dipenuhi suatu entitas selama penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut ketentuan SAK ETAP terdiri dari, dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, serta keseimbangan antara biaya dan manfaat. Sedangkan menurut ketentuan SAK EP terdiri dari, keterpahaman, relevansi, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, prudensi, kelengkapan, keterbandingan, ketepatanwaktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta biaya atau usaha yang berlebihan. Maka dari itu Standar Akuntansi Keuangan merupakan tolak ukur atau pedoman yang digunakan oleh suatu entitas untuk melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dibutuhkan seseorang

yang berkompeten di bidang akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu entitas.

Untuk menunjang laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dibutuhkan seseorang yang berkompeten dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas dengan berpedoman pada standar yang berlaku. Seperti halnya pada objek penelitian saat ini yaitu Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung khususnya untuk para pengurus, pengawas, manager, dan seluruh staf akuntansi koperasi diharapkan memiliki kompetensi akuntansi untuk menghadapi standar terbaru yaitu SAK Entitas Privat pada tahun 2025 mendatang.

Dikarenakan dalam penelitian ini akan melihat kompetensi dari staf akuntansi, manager, pengurus dan pengawas koperasi, maka dari itu sebelumnya terdapat pengertian Sumber Daya Manusia menurut Mangkunegara (2013 :2), yaitu :

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.”

Kemudian kompetensi itu sendiri menurut Spencer dalam buku (Moehariono,2014:5) kompetensi dapat didefinisikan sebagai:

“Karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada saat situasi tertentu (*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*).”

Menurut Spencer kompetensi terdiri dari motif (*motive*), sifat (*trait*), bawaan (*self-concept*), dan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*). Begitupun kompetensi staf akuntansi untuk memiliki kompetensi dalam hal motif (*motive*), sifat (*trait*), bawaan (*self-concept*), dan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*).

Maka dari itu seluruh badan usaha khususnya koperasi juga perlu mengedepankan kompetensi dengan tujuan untuk memajukan koperasi. Karena seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang semakin pesat, pengelolaan koperasi yang handal sangat dibutuhkan terutama staf akuntansi keuangan yang profesional, para pengurus, pengawas serta manager koperasi. Sebab laporan keuangan dijadikan tolak ukur bagi koperasi dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki serta untuk memperhitungkan pendapatan yang telah dicapai.

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) adalah koperasi serba usaha yang memiliki unit usaha simpan pinjam, usaha niaga, dan usaha jasa. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung ini berlokasi di Jalan Wastukencana Nomor 5, Kota Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini berdiri sejak tanggal 11 Mei 1962 yang sebelumnya bernama Koperasi Pegawai Otonom Kota Praja Bandung dan kemudian pada tahun 1967 memperoleh badan hukum sehingga nama koperasi menjadi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung terhadap Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), saat ini Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) menggunakan pedoman SAK ETAP, namun

berdasarkan forum RAT 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2022 yang dihadiri para dewan dan menyarankan untuk mulai melakukan penerapan secara dini SAK Entitas Privat sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan koperasi di masa mendatang dengan tujuan lebih meningkatkan kembali kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Karena diduga dalam penyusunan laporan keuangan koperasi masih belum bisa dikatakan sempurna dalam memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku dimana permasalahan terjadi pada kriteria prudensi atau disebut dengan tingkat kehati-hatian dalam melakukan estimasi serta permasalahan terjadi pada kriteria ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung mengamanatkan bahwa pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun buku sebelumnya. Namun pernah terjadi keterlambatan menurut AD ART Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung pada tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada bulan Mei. Keterlambatan pelaksanaan RAT tersebut karena karyawan, manager, pengurus dan pengawas diduga kurang dalam mempersiapkan kelengkapan RAT yang pada saat itu adanya pergantian kepengurusan.

Permasalahan berikutnya yang menjadi masalah serius pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yaitu pada tahun 2020 keluarnya Surat Edaran

dari Wali Kota dengan Nomor KU.04.04/1376-BKPP/IV/2020 tentang Permohonan Penangguhan Pembayaran Pinjaman Kredit KPKB kepada Anggota akibat virus Covid-19 di Indonesia. Penangguhan pembayaran pinjaman kredit tersebut berlangsung selama bulan Mei, Juni dan Juli 2020 yang dibuktikan dari tabel jumlah nilai piutang kredit uang KPKB yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Nilai Piutang Kredit Uang Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Per 31 Desember 2020

Bulan	Peminjam	Nilai Pinjaman	Nilai Angsuran
Januari	100	Rp 3,066,000,000.00	Rp 2,975,744,615.00
Februari	99	Rp 3,009,500,000.00	Rp 1,776,607,893.00
Maret	131	Rp 4,570,500,000.00	Rp 4,411,759,891.00
April	92	Rp 5,189,833,333.00	Rp 3,420,730,660.00
Mei	11	Rp 173,022,226.00	Rp 275,485,928.00
Juni	24	Rp 372,000,000.00	Rp 417,503,454.00
Juli	18	Rp 511,416,667.00	Rp 783,660,225.00
Agustus	60	Rp 3,863,500,000.00	Rp 3,029,806,195.00
September	45	Rp 3,365,000,000.00	Rp 2,749,693,594.00
Oktober	55	Rp 4,355,000,000.00	Rp 3,288,436,869.00
November	129	Rp 4,037,353,000.00	Rp 3,021,568,353.00
Desember	395	Rp 3,535,739,402.00	Rp 2,802,954,443.00
Jumlah	1.159	Rp 36,048,864,628.00	Rp 28,953,952,120.00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Tahun Buku 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas mengenai data jumlah nilai piutang kredit uang pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tahun buku 2020 menunjukkan bahwa pada bulan Mei, Juni dan Juli besaran nilai pinjaman serta angsuran ketiga bulan tersebut cenderung menurun dari bulan Mei dan meningkat kembali di bulan Agustus. Pada saat itu KPKB tidak ada pemasukan mengenai angsuran anggota kepada koperasi sehingga bunga pun tidak terbayarkan. Maka dari itu pada bulan Mei, Juni dan Juli kesulitan dalam pembayaran gaji karyawan.

Permasalahan yang terjadi pada kompetensi akuntansi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan realitanya yaitu berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Bagian Keuangan KPKB, pada tahun 2020 terdapat satu orang staf akuntansi keuangan yang diduga kurang berkompeten dalam pencatatan transaksi dan kemudian dipindahkan ke bagian umum. Kepala bagian keuangan tersebut memperoleh keluhan dari anggota KPKB mengenai kesalahan catat informasi keuangannya. Salah satu kesalahan yang ditemukan yaitu pembayaran anggota yang sudah lunas namun masih dipotong dan sebaliknya pembayaran anggota yang belum lunas tapi tidak dipotong dan tidak dicatat. Maka dari itu menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam melakukan pencatatan transaksi yang berpengaruh nantinya dalam laporan keuangan. Selain itu para staf akuntansi, manager, pengurus dan pengawas kurang berkompeten dalam mengendalikan waktu penyusunan laporan keuangan sehingga masih terjadi keterlambatan RAT.

Oleh karena itu untuk menunjang keberlangsungan koperasi dan laporan keuangan koperasi yang berkualitas sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku, hendaknya didukung oleh staf akuntansi keuangan yang lebih berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan. Selain staf akuntansi, para pengurus dan pengawas serta manager juga sebaiknya memiliki kompetensi di bidang akuntansi karena para pengurus dan pengawas serta manager juga berperan dalam pengelolaan koperasi. Baik berkompeten mengenai ketepatan waktu maupun memahami kondisi dan mengestimasi kerugian yang tidak terduga di masa depan.

Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung masih belum dikatakan sempurna karena kriteria ketepatan waktu dan prudensi masih belum diimplementasikan dengan baik. Juga berhubung SAK ETAP yang saat ini merupakan pedoman atau standar yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung akan coba beralih ke SAK Entitas Privat (SAK EP) dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 namun penerapan dini sudah mulai dilakukan pada tahun 2022. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH KESIAPAN KOMPETENSI AKUNTANSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP) DIMASA MENDATANG (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat beberapa pertanyaan yang diuraikan dalam identifikasi masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesiapan kompetensi akuntansi seperti apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada para pengelola koperasi khususnya pengurus, pengawas, manager serta staf akuntansi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

2. Bagaimana kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dimasa mendatang pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)
3. Seberapa besar pengaruh kesiapan kompetensi akuntansi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dimasa mendatang pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, maka diperoleh maksud dan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur seberapa besar pengaruh kesiapan kompetensi para akuntansi untuk menghadapi penerapan Standar Akuntansi Keuangan terbaru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) agar memperoleh kualitas laporan keuangan koperasi yang baik sesuai dengan karakteristik kualitas laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. SAK EP ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang, namun penerapan dini sudah mulai dilakukan di tahun 2022. Sehingga kesiapan kompetensi akuntansi para staf akuntansi, pengurus dan pengawas serta manager guna meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar terbaru yang nantinya akan diterapkan perlu diperhatikan dari sekarang. Maka dari itu, hal tersebut dapat menjadi bahan penyusunan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN UNIVERSITY).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kesiapan kompetensi akuntansi seperti apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada para pengelola koperasi khususnya pengurus, pengawas, manager serta staf akuntansi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dimasa mendatang pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesiapan kompetensi akuntansi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dimasa mendatang pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi sebagai referensi bidang akuntansi keuangan khususnya mengenai kompetensi staf akuntansi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang telah memenuhi karakteristik penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Pada penelitian ini memperkenalkan Standar Akuntansi Keuangan

terbaru yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025 namun penerapan dini sudah boleh dilakukan di tahun 2022.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan serta informasi baru mengenai kompetensi staf akuntansi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang telah memenuhi karakteristik penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

2. Bagi IKOPIN UNIVERSITY

Hasil dari penelitian ini menambah referensi jurnal skripsi terbaru yang berkaitan dengan informasi kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berguna untuk masa yang akan datang.